



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Muhammad Irman
Assignment title: Jurnal
Submission title: KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAI
File name: ejournal_Muhammad_Irman_1502025C
File size: 322.5K
Page count: 15
Word count: 4,406
Character count: 29,238
Submission date: 25-Jan-2023 08:37P
Submission ID: 1999117147

27 %

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.

NIP. 19631222 199002 1 001

**KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA BANGUN
SEBERANG KECAMATAN KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Muhammad Irman

Abstrak

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dimana menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kota Bangun seberang masih belum optimal karena masih ditemui beberapa kekurangan dalam proses koordinasinya yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa seperti masih banyaknya perbedaan pendapat yang dimana setiap individu masih mempertahankan persepsi masing-masing sehingga menimbulkan perdebatan sehingga memakan waktu lebih lama dalam menetapkan rancangan pembangunan desa, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya, dan anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemahaman mereka bahwa BPD hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya.

Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa.

Pendahuluan

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kerangka tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Kota Bangun Seberang, ketika Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat sudah membahas prioritas pembangunan untuk setiap RT dalam musyawarah desa (MUSDES) setelah itu, hasil musyawarah tersebut akan di bahas lagi di musyawarah perencanaan